

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Harapan para investor atau pemilik modal yang menginvestasikan dana di suatu perusahaan adalah menginginkan harga saham yang tinggi. Investor atau pemilik modal menginginkan pengembalian yang tinggi. Namun dalam praktiknya di sebuah perusahaan terdapat pihak yang memanajemenkan perusahaan yaitu manajemen perusahaan. Kedua pihak tersebut memiliki tujuan yang berbeda sehingga muncullah hubungan agensi. Teori keagenan menjelaskan bahwa dalam sebuah perusahaan terdapat pemegang saham atau pemilik modal yang disebut sebagai prinsipal dan manajemen yang menjalankan operasional perusahaan disebut agen. Anthony dan Govindarajan (1995) menyatakan bahwa konsep teori keagenan adalah hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Hubungan kontrak antar prinsipal dan agen ini terjadi karena adanya keterbatasan pemilik modal dalam mengelola perusahaan yang hanya sebatas pada investasi saja, sedangkan agen berkewajiban untuk membantu prinsipal dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan yang modalnya juga terdiri dari modal saham, pemilik modal akan menjadi pihak prinsipal dan CEO (*chief executive officer*) bertindak sebagai agen (Santoso, 2012). Konsep keagenan ini menegaskan adanya dua pihak yang mana masing-masing pihak memiliki kepentingan dan motivasi yang berbeda.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga sifat dasar manusia, yaitu:

1. Manusia yang pada dasarnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Oleh karena sifat dasar manusia tersebut, menyebabkan informasi yang dihasilkan oleh seorang manusia untuk manusia lain akan dipertanyakan reabilitasnya, maka

dapat dikatakan bahwa manajemen perusahaan sebagai manusia juga memiliki kepentingan pribadi dan cenderung bertindak *opportunistic*. Ketika agen cenderung bertindak *opportunistic* agen tersebut akan berpikir untuk selalu meningkatkan kepentingan pribadinya. Konflik akan terjadi ketika prinsipal tidak dapat memantau dan memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan keinginannya, terlebih karena prinsipal tidak memiliki banyak informasi tentang perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan informasi antara pihak pemilik modal sebagai prinsipal dan pihak manajemen sebagai agen, yang tidak lain disebut asimetri informasi.

Asimetri informasi terjadi ketika pihak agen lebih memiliki banyak informasi dari pada prinsipal, karena adanya hal tersebut pihak agen cenderung memiliki hasrat untuk menyajikan informasi yang mereduksi kepada prinsipal. Dorongan dari pihak manajemen atau agen untuk memenuhi kepentingan pribadi membuat informasi yang akan dilaporkan menjadi bias yang pada akhirnya akan memicu agen dalam memanipulasi akuntansi untuk kepentingan pribadinya. Terdapat juga cara dalam mengurangi konflik agensi dan asimetri informasi yaitu dengan menerapkan mekanisme *corporate governance* terutama komite audit, karena dengan diterapkannya komite audit yang baik dalam melakukan pengawasan kepada manajemen hal tersebut diharapkan akan dapat menghasilakan informasi yang sebenarnya dan mampu menakutkan para investor bahwa mereka telah mendapatkan informasi yang sebenarnya yang serupa dengan informasi yang dimiliki pihak manajemen. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan mengungkapkan informasi yang terintegrasi dan transparan untuk seluruh pemilik modal atau investor.

2.1.2 Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana terdapat ketidak seimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* yang pada umumnya sebagai pengguna informasi (Ramadani, 2017). Manajemen sebagai pengelola perusahaan akan memiliki informasi atas kinerja perusahaan dan prospek

perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan pemilik modal sebagai prinsipal, karena hal tersebut agen yang bekerja untuk kepentingan prinsipal seharusnya memberikan sinyal yang sebenarnya tentang kondisi perusahaan kepada prinsipal. Sinyal yang diberikan dapat berupa laporan keuangan yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja agen kepada prinsipal. Informasi yang diberikan agen sering kali tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sedangkan disisi lain prinsipal sangat bergantung dengan informasi yang diberikan agen untuk pengambilan keputusan maupun kepentingan investasi, dikarenakan prinsipal memiliki keterbatasan informasi dalam perusahaan. Disisi lain asimetri informasi mendorong investor melakukan pencarian non publik secara individu yang dimana membuat informasi yang diperoleh setiap investor berbeda-beda. Scott (2015) menjelaskan tentang dua macam asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang sedang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak lain. *Adverse selection* akan terjadi ketika pihak manajer atau pihak internal dalam suatu perusahaan mengetahui lebih banyak informasi mengenai keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham atau pihak luar.
2. *Moral hazard* adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak semuanya diketahui oleh investor, sehingga pihak manajer dapat melakukan tindakan diluar sepengetahuan pemegang saham.

Adverse selection memiliki perbedaan dengan *moral hazard* dalam hal perencanaan, namun juga memiliki kesamaan dalam hal adanya unsur kesengajaan. Pada awalnya *adverse selection* memiliki indikasi untuk memberikan informasi, namun karena pihak lain tidak tahu atau dianggap tidak tahu maka informasi tersebut tidak jadi diberikan, sedangkan pada *moral hazard* sejak awal telah terdapat indikasi untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak lain (Scott, 2015). Asimetri informasi dalam hal ini dapat diseimbangkan dengan regulasi. Regulasi yang mewajibkan informasi tertentu diungkap secara publik, akan mengurangi asimetri informasi, antara manajemen dengan pihak eksternal. Oleh karena kepentingan pribadi, manajemen cenderung enggan untuk

mengungkapkan informasi yang dapat meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan umum, maka regulasilah yang dapat menyeimbangkan kepentingan tersebut (Khairina, 2018).

Asimetri informasi dalam hal ini dapat dikurangi dengan cara melakukan pengungkapan informasi keuangan. Asimetri informasi antara agen dan prinsipal juga dapat dikurangi dengan peran komite audit yang baik dan berkualitas dalam pengawasan kepada pihak manajemen perusahaan. Penerapan peran komite audit disini dapat dijadikan struktur, sistem serta proses yang berintegrasi untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, dan adil. Sehingga dengan demikian komite audit ditujukan untuk mengurangi asimetri informasi.

Asimetri informasi dalam pengukurannya seringkali diproksikan dengan *bid-ask spread* karena asimetri informasi tidak dapat diteliti secara langsung. Harga *bid* dalam hal ini merupakan harga permintaan pasar, harga *bid* ini akan digunakan ketika melakukan transaksi jual, sedangkan harga *ask* adalah penawaran pasar yang digunakan ketika melakukan transaksi beli, dan adanya selisih antara harga *bid* dan *ask* disebut sebagai *spread* (Kusuma, 2014). *Bid-ask spread* sendiri merupakan suatu fungsi dari tiga komponen biaya yang berasal dari antara lain: (1) Pemilik saham, (2) Pemrosesan pesanan, dan (3) Asimetri informasi. Biaya asimetri informasi dapat terjadi karena adanya dua pihak *trader* yang memiliki ketidaksamaan dalam memiliki dan mengakses suatu informasi. Pihak pertama *trader* adalah *informed trader* yang memiliki informasi superior dan pihak kedua *trader* adalah *uninformed trade* yang tidak memiliki informasi (Kusuma, 2014).

2.1.3 Komite Audit

Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada komite audit, dikarenakan komite audit merupakan pihak akhir dari *corporate governance* yang memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan dan mempengaruhi kebijakan yang akan diambil perusahaan berkaitan dengan prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan (Gantyowati dan Nugroho,

2009). Agar penyelenggaraan *corporate governance* dapat berjalan dengan baik, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain Bapepam dengan Surat Edaran No. SE-03/PM/2000 yang mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk Komite Audit dengan anggota minimal tiga orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Gantjowati dan Nugroho, 2009).

Komite audit untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris. Komite audit dalam membantu dewan komisaris perlu mempertahankan independensi yang dimana komite audit harus beranggotakan komisaris independen dan juga pihak luar perusahaan yang tidak ambil alih dalam kegiatan manajemen sehari-hari dan juga mempunyai tanggung jawab utama dalam membantu dewan komisaris untuk menjalankan tanggung jawabnya terutama yang berhubungan dengan masalah kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal serta proses pelaporan keuangan.

Komite audit yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi audit internal, laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal dapat mengurangi sifat *opportunistic* yang cenderung dilakukan manajemen dalam melakukan asimetri informasi dengan cara mengawasi proses penyusunan laporan keuangan dan melakukan pengawasan kepada audit eksternal. Terdapat dua keuntungan pengawasan potensial yang didapat dari memberikan tanggungjawab tersendiri kepada komite audit, yaitu independensi dan efisiensi dewan (Gantjowati dan Nugroho, 2009). Independensi dan integritas pengawasan dapat meningkat dengan adanya laporan dari internal dan eksternal auditor kepada dewan yang terdiri dari *outside director* (Gantjowati dan Nugroho, 2009). Komite audit juga dapat membantu menaikkan efisiensi dari fungsi dewan, yang dimana mengakibatkan hal ini menjadi sangat penting apabila ukuran dari suatu dewan besar. Komite audit juga merupakan pihak terakhir yang memonitor atau mengawasi proses pelaporan keuangan suatu perusahaan dan komite audit juga mempengaruhi suatu kebijakan yang akan diambil perusahaan berdasarkan prinsip yang digunakan dalam proses

pelaporan keuangan perusahaan tersebut. Kepentingan keberadaan komite audit juga berkaitan karena belum optimalnya peran pengawasan dari dewan komisaris di perusahaan.

Tanggung jawab komite audit adalah untuk memastikan bahwa perusahaan sudah dijalankan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku, melaksanakan pengawasan secara efektif, dan melaksanakan tugasnya dengan beretika. Tujuan pembentukan komite audit adalah (Setiawan, 2013):

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
2. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
3. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Komite audit sendiri secara umum berfungsi untuk memberi pandangan mengenai masalah apa saja yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi, keuangan dan pengendalian internal. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan perusahaan yang baik, Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan untuk perusahaan yang tercatat wajib memiliki komisaris independen dan komite audit (Setiawan, 2013). Seperti yang dimana telah di sebutkan dalam peraturan pemerintah (Bapepam) bahwa keanggotaan komite audit minimal terdiri dari tiga orang anggota yang memiliki kemampuan akuntansi dan keuangan. Sesuai dengan teori keagenan yang ada, komite audit dapat mengurangi asimetri informasi dengan memiliki kompetensi atau keahlian khusus guna meningkatkan keefektifitasnya. Keahlian komite audit di bidang akuntansi dan keuangan membuat komite audit mampu memahami manajemen risiko yang terjadi di perusahaan, dan jika komite audit tidak memiliki kemampuan dalam memahami teknis pelaporan keuangan dan proses audit, maka peran pengawasan dari komite audit mungkin akan berkurang. Teori keagenan menyatakan kualitas pengawasan yang baik akan menurunkan perilaku *opportunistic* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga manajemen perusahaan akan bekerja untuk kepentingan para prinsipalnya. Hal tersebut membuat komite audit perlu melakukan pertemuan yang teratur dalam

melaksanakan pengawasan atas pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan, karena dengan adanya pertemuan yang teratur komite audit terbantu dalam memonitor catatan akuntansi dan sistem pengendalian internal, sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi dan kualitas audit. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit di dalam perusahaan akan membuat proses pelaporan keuangan maupun non keuangan perusahaan termonitor dengan baik, dan mampu dalam mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan sebagai agen dan pihak investor sebagai prinsipal dengan menyajikan laporan yang transparan dan terintegrasi. Sehingga dengan demikian komite audit akan diukur dengan keahlian komite audit yang didapat dari jumlah anggota komite audit yang memiliki ahli keuangan atau akuntansi serta frekuensi pertemuan komite audit.

2.1.4 Integrated Reporting

The International Integrated Reporting Council (IIRC), mendefinisikan bahwa *integrated reporting* sebagai suatu proses yang menghasilkan komunikasi oleh organisasi yang paling jelas, laporan terpadu periodik tentang bagaimana strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek mengarah pada penciptaan nilai jangka pendek, menengah dan panjang (IIRC, 2013). Konsep inti dari *integrated reporting* adalah menyediakan laporan yang sepenuhnya mengintegrasikan informasi keuangan maupun non keuangan perusahaan. Dalam pembentukannya *integrated reporting* memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dari suatu informasi perusahaan yang tersedia untuk pihak pemilik modal atau investor sehingga investor dapat mengalokasikan modal lebih efisien dan produktif, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung pemikiran yang terintegrasi dalam pengambilan guna untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, transparan, dan terintegrasi. Berdasarkan definisi secara umum *integrated reporting* merupakan suatu penyajian laporan tahunan yang lengkap, terpadu dan terintegritas dimana dalam satu laporan tunggal terdapat informasi mengenai strategi, tata kelola, kinerja dan prospek yang berkaitan satu dengan yang lainnya (Novaridha, 2017). Adapula prinsip-prinsip

integrated reporting yang diberikan oleh IIRC dalam mengungkapkan informasi perusahaan, antara lain (Kustiani, 2016):

1. *Strategic focus and future orientation*

Sebuah laporan terintegrasi harus memberikan pemahaman yang dalam mengenai strategi organisasi, dan bagaimana kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang dan penyalahgunaannya dalam dan efek pada kapital.

2. *Connectivity of information*

Sebuah laporan yang terintegrasi harus menunjukkan gambaran menyeluruh dari kombinasi, keterkaitan dan ketergantungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu.

3. *Stakeholder relationships*

Sebuah laporan yang terintegrasi harus memberikan pemahaman sifat dan kualitas hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemahaman organisasi dalam mempertimbangkan dan merespon kebutuhan dan kepentingan.

4. *Materiality*

Sebuah laporan yang terintegritas harus mengungkapkan informasi tentang hal-hal substantif yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

5. *Conciseness*

Sebuah laporan yang terintegrasi harus singkat. Artinya, sebuah laporan yang terintegrasi meliputi konteks yang cukup untuk memahami strategi organisasi, tata kelola, kinerja dan prospek tanpa ditambah dengan informasi yang kurang relevan.

6. *Reability and completeness*

Sebuah laporan yang terintegrasi harus mencakup semua hal yang material, baik positif maupun negatif, secara seimbang dan tanpa kesalahan yang material.

7. *Consistency and comparability*

Informasi dalam laporan yang terintegrasi harus disajikan: (1) secara yang konsisten dari waktu ke waktu, (2) dengan cara yang memungkinkan perbandingan dengan organisasi lain terhadap hal material untuk organisasi.

Integrated reporting selain memiliki beberapa prinsip juga memiliki beberapa elemen sesuai dengan *IR Framework* yang harus terpenuhi agar sebuah laporan perusahaan disebut sebagai laporan yang terintegrasi (Kustiani, 2016):

1) Gambaran organisasi dan lingkungan eksternal

Gambaran organisasi menjelaskan organisasi perusahaan baik dari visi, misi, budaya, struktur kepemilikan, maupun aktivitas perusahaan. Lingkungan eksternal menggambarkan kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan, seperti aspek hukum, sosial, lingkungan ekonomi, tantangan pasar, dan kondisi politik.

2) Tata kelola perusahaan

Tata kelola menggambarkan struktur tata kelola perusahaan yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan menciptakan nilai baik jangka pendek, menengah, dan panjang.

3) Model bisnis

Model bisnis perusahaan adalah sistem perusahaan yang dapat mengubah input melalui aktivitas perusahaan yang menghasilkan *output* dan *outcome*.

4) Risiko dan peluang

Risiko dan peluang menjelaskan risiko dan peluang spesifik pada perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Elemen ini juga menjelaskan cara perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang yang terjadi pada perusahaan.

5) Strategi dan alokasi

Strategi dan alokasi menjelaskan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia pada perusahaan.

6) Kinerja

Kinerja menggambarkan kinerja perusahaan pada tahun berjalan yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

7) Prospek masa depan

Prospek masa depan menjelaskan kondisi pada masa akan datang yang berkaitan dengan perusahaan. Perospek masa depan meliputi prospek maupun tantangan yang akan dihadapi perusahaan.

8) Dasar pengungkapan

Dasar pengungkapan merupakan dasar pengungkapan elemen yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan agar dapat dievaluasi tingkat pemenuhan kriteria pelaporan.

Hal ini membuat *integrated reporting* hadir dengan tampilan yang sempurna, karena semua unsur-unsur yang tidak tersaji dalam model pelaporan sebelumnya tersaji dalam *integrated reporting*. *Integrated reporting* juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, *integrated reporting* penting diterapkan dalam perusahaan sebab *integrated reporting* akan menghasilkan informasi keuangan dan non keuangan yang dapat mendukung keefektifan pengambilan keputusan serta menjadikan *integrated reporting* menjadi media komunikasi yang sempurna kepada pemilik modal atau investor, sehingga dengan demikian pemilik modal atau investor akan mendapatkan hak mereka dalam mendapatkan informasi keuangan maupun non keuangan perusahaan sesungguhnya yang sesuai dengan kondisi perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Chariri dan Januarti (2017)

Penelitian Chariri dan Januarti (2017) dengan judul Eksplorasi Elemen *Integrated Reporting* dalam *Annual Reports* Perusahaan di Indonesia bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan luas lingkup *integrated reporting* dan menguji pengaruh karakteristik komite audit (keahlian dan pertemuan) terhadap luas lingkup elemen *integrated reporting* terhadap *annual report* perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang diteliti adalah *integrated reporting* sebagai variabel dependen, dan keahlian komite audit serta frekuensi pertemuan komite audit sebagai variabel independen. Obyek yang diteliti

adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 170 *annual report* perusahaan sebagai data penelitian. Hasil pengujian dengan alat statistik STATA/MP14 menyimpulkan bahwa variabel keahlian komite audit dan rapat komite audit berpengaruh positif terhadap luas lingkup *integrated reporting*.

2. Ramadani (2017)

Penelitian Ramadani (2017) dengan judul Pengaruh Penyajian Elemen-Elemen *Integrated Reporting* dalam Laporan Tahunan Terhadap Asimetri Informasi bertujuan untuk membuktikan pengaruh gambaran organisasi dan lingkungan eksternal, tata kelola, peluang dan resiko, strategi dan alokasi sumberdaya, model bisnis, kinerja, tampilan masa depan berpengaruh terhadap asimetri informasi. Variabel yang diteliti adalah asimetri informasi sebagai variabel dependen, dan elemen-elemen *integrated reporting* (gambaran organisasi dan lingkungan eksternal; tata kelola; peluang dan resiko; strategi dan alokasi sumberdaya; model bisnis; kinerja; tampilan masa depan) sebagai variabel independen. Obyek yang diteliti adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sebanyak 81 sampel perusahaan. Hasil pengujian dengan alat statistik SPSS versi 22 menyimpulkan bahwa variabel gambaran organisasi dan lingkungan eksternal; tata kelola; model bisnis; strategi dan alokasi sumber daya; kinerja; serta tampilan dimasa depan tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015, sedangkan variabel risiko dan peluang berpengaruh terhadap asimetri informasi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015.

3. Khairina (2018)

Penelitian Khairina (2018) dengan judul Pengaruh *Integrated Reporting* Terhadap Asimetri Informasi bertujuan untuk menganalisis pengaruh *integrated reporting* yang dijabarkan menjadi elemen gambaran organisasi dan lingkungan eksternal, tata kelola organisasi, model bisnis, resiko dan peluang, strategi dan alokasi, kinerja, prospek masa depan, dan dasar pengungkapan elemen terhadap asimetri informasi. Variabel yang diteliti adalah asimetri

informasi sebagai variabel dependen, dan elemen gambaran organisasi dan lingkungan eksternal; tata kelola organisasi; model bisnis; resiko dan peluang; strategi dan alokasi; kinerja; prospek masa depan; dan dasar pengungkapan elemen sebagai variabel independen. Obyek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sektor *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016, sebanyak 27 sampel perusahaan dengan kurun waktu 4 tahun penelitian, sehingga total sampel yang diperoleh sebanyak 108 sampel. Hasil pengujian dengan alat statistik SPSS 19 menyimpulkan bahwa variabel pengungkapan resiko dan peluang berpengaruh negatif signifikan terhadap asimetri informasi, sedangkan variabel pengungkapan elemen gambaran organisasi dan lingkungan eksternal; tata kelola organisasi; model bisnis; strategi dan alokasi; kinerja; prospek masa depan; dan dasar pengungkapan elemen tidak berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi.

4. Fiarti (2016)

Penelitian Fiarti (2016) dengan judul Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Luas Lingkup *Integrated Reporting* bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit, seperti kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan independensi komite audit terhadap luas lingkup *integrated reporting*. Variabel yang diteliti adalah *integrated reporting* sebagai variabel dependen, dan kompetensi komite audit; frekuensi rapat komite audit; dan independensi komite audit sebagai variabel independen. Obyek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Afrika Selatan tahun 2014 dengan jumlah total sampel sebanyak 57 sampel data. Hasil pengujian dengan alat statistik SPSS menyimpulkan bahwa variabel kompetensi komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas lingkup *integrated reporting*, sedangkan variabel independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas lingkup *integrated reporting*.

5. Ahmad (2017)

Penelitian Ahmad (2017) dengan judul Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP Terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka *Integrated Reporting* bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap tingkat keselarasan laporan tahunan dengan rerangka *integrated reporting* (IR). Variabel yang diteliti adalah *integrated reporting* sebagai variabel dependen, dan komite audit; ukuran perusahaan; dan ukuran KAP sebagai variabel independen. Obyek yang diteliti adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2015, dengan total sampel sebanyak 64 sampel selama dua tahun pengamatan. Hasil pengujian dengan alat statistik SPSS menyimpulkan bahwa variabel komite audit, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat keselarasan laporan tahunan dengan rerangka *integrated reporting*..

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Chariri dan Januarti (2017)	Variabel independen komite audit yang terdiri dari keahlian komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit.	- Variabel dependen yaitu asimetri informasi. - Mengganti <i>integrated reporting</i> dari variabel dependen menjadi variabel mediasi. - Penelitian saat ini menggunakan obyek penelitian perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. - Alat statistik yang digunakan penelitian sekarang adalah alat statistik SPSS.
Ramadani (2017)	- Variabel dependen asimetri informasi. - Menggunakan obyek penelitian perusahaan non keuangan.	Penelitian saat ini menggunakan variabel independen keahlian komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit.

		• Mengubah <i>integrated reporting</i> dari variabel independen menjadi variabel mediasi. • Menambah periode data penelitian menjadi 2015-2017.
Khairina (2018)	• Variabel dependen asimetri informasi.	• Penelitian saat ini menggunakan variabel independen keahlian komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit. • Mengubah <i>integrated reporting</i> dari variabel independen menjadi variabel mediasi. • Penelitian saat ini menggunakan obyek penelitian perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
Fiarti (2016)	• Variabel independen komite audit yang meliputi kompetensi komite audit (keahlian komite audit) dan frekuensi rapat komite audit (frekuensi pertemuan komite audit).	• Penelitian saat ini menggunakan variabel dependen asimetri informasi. • Menggubah <i>integrated reporting</i> dari variabel dependen menjadi variabel mediasi. • Mengubah obyek penelitian menjadi perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
Ahmad (2017)	• Variabel independen komite audit.	• Penelitian saat ini tidak memakai ukuran perusahaan dan ukuran KAP sebagai variabel independen. • Penelitian saat ini menggunakan variabel dependen asimetri informasi. • Menggunakan obyek penelitian perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

Sumber: Data diolah (2018)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Asimetri Informasi

Peran penting dalam penerapan *corporate governance* dapat dilihat dari sisi salah satu tujuan penting didalam mendirikan sebuah perusahaan yang selain untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, juga untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan, maka perusahaan perlu memiliki suatu sistem *corporate governance* yang baik (Khairina, 2018). Dengan memberikan informasi yang terbuka mengenai *corporate governance*, maka dapat memudahkan pihak eksternal untuk memahami seluk beluk perusahaan secara detail tanpa harus terlibat secara langsung dalam keseluruhan kegiatan perusahaan, maka dari itu pengungkapan *corporate governance* dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi antara manajemen dengan pihak eksternal (Khairina, 2018). Dalam hal ini komite audit merupakan pihak akhir dari *corporate governance* yang memonitor proses pelaporan keuangan perusahaan dan mereka akan mempengaruhi kebijakan yang diambil perusahaan berkaitan dengan prinsip yang digunakan dalam pelaporan keuangan (Gantjowati dan Nugroho, 2009).

Komite audit dalam hal ini dapat mengurangi asimetri informasi karena komite audit dinilai memiliki kompetensi atau keahlian khusus, oleh karena itu keahlian khusus yang dimiliki komite audit seperti memiliki pengetahuan akuntansi atau keuangan dan memiliki pengalaman pelatihan cenderung akan mampu memahami manajemen risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Apabila komite audit tidak memiliki keahlian dalam memahami teknis proses audit dan mekanisme pelaporan keuangan, maka peranan pengawasan komite audit akan berkurang. Pengawasan sendiri merupakan hal yang penting dalam *corporate governance*, pengawasan yang berkualitas baik akan mengurangi perilaku *opportunistic* dari manajer, sehingga mengakibatkan manajer akan bekerja untuk kepentingan para prinsipal. Melakukan pertemuan rutin dalam melaksanakan pengawasan pelaporan keuangan dan pengendalian internal merupakan hal yang perlu dilakukan oleh komite audit, karena pertemuan yang rutin dan terjadwal dengan baik akan

membantu dalam memonitor pelaporan keuangan dan pengendalian internal serta akan menghasilkan informasi yang berkualitas.

Dari penjelasan di atas akan diuji hipotesis:

H_{1a} : Keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap asimetri informasi.

H_{1b} : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap asimetri informasi.

2.3.2 *Integrated Reporting* sebagai pemediasi dengan Komite Audit dan Asimetri Informasi

Laporan keuangan merupakan media yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang diharapkan dapat menyediakan informasi bermanfaat bagi pihak berkepentingan dengan mengevaluasi keberhasilan perusahaan dan dalam hal ini *integrated reporting* menekankan pentingnya suatu transparansi di dalam pelaporan kinerja perusahaan (Ramadani, 2017).

Penelitian yang dilakukan Chariri dan Januarti (2017) memberikan hasil penelitian bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *integrated reporting*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Fiarti (2016) dan Ahmad (2017) memberikan hasil penelitian bahwa komite audit berpengaruh terhadap *integrated reporting*. Penelitian yang dilakukan Ramadani (2017) dan Khairina (2017) memberikan hasil penelitian bahwa *integrated reporting* berpengaruh terhadap asimetri informasi.

Integrated reporting dalam hal ini berperan dalam memediasi komite audit dengan asimetri informasi karena *integrated reporting* merupakan pelaporan keuangan yang mengutamakan transparansi dalam pelaporan kinerja perusahaan, yang juga diyakini mampu menyajikan laporan keuangan maupun non keuangan lebih transparan, efektif, dan terintegrasi. Hal tersebut merupakan suatu karakteristik yang digunakan untuk mengurangi asimetri informasi, yaitu dengan cara manajemen perusahaan harus menyajikan laporan keuangan dengan sejujurnya atau transparan mungkin kepada para pemilik modal atau investor, karena dengan begitu investor akan percaya kepada perusahaan dan merasa haknya telah terpenuhi. Dalam hal ini komite audit berperan mengawasi manajemen perusahaan

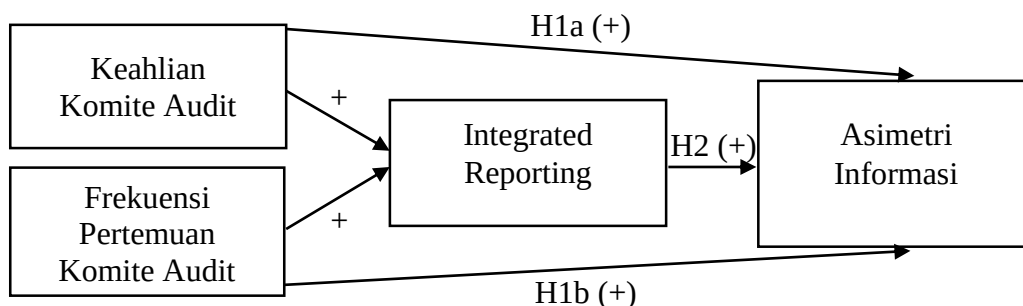
dalam proses penyusunan laporan kinerja perusahaan, dan dengan menerapkan *integrated reporting* akan menghasilkan laporan perusahaan yang efektif, transparan serta terintegrasi, yang akan berguna dalam mengurangi asimetri informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, *et al.* (2015) memberikan hasil penelitian bahwa *corporate governance* tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi pada perusahaan yang memiliki skor dari *ASEAN corporate governance scorecard* tahun 2010, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gantjowati dan Nugroho (2009) memberikan hasil bahwa komite audit independen tidak berpengaruh dan tidak memiliki kolerasi terhadap penurunan asimetri informasi di sekitar pengumuman laba. Dengan ketidaksignifikanan hasil yang dilakukan beberapa peneliti tersebut maka penelitian ini menggunakan *integrated reporting* sebagai variabel pemediasi untuk menguji apakah komite audit berpengaruh dalam mengurangi asimetri informasi. Dari penjelasan di atas akan diuji hipotesis:

H₂ : *Integrated reporting* memediasi hubungan komite audit terhadap asimetri informasi.

2.4 Rerangka Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, penelitian ini menggunakan variabel independen komite audit, variabel dependen asimetri informasi, dan variabel mediasi *integrated reporting*. Gambar 2.1 merupakan pengembangan model penelitian terhadap variabel-variabel yang saling berhubungan.



Gambar 2.1. Model Penelitian